

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan proses pembangunan suatu negara, karena menggambarkan kemampuan ekonomi suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Indikator yang umum digunakan untuk mengukurnya ialah Produk Domestik Bruto (PDB) riil dengan harga konstan (Yulyanti, 2023). Nilai PDB menggambarkan bagaimana suatu negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Jika suatu negara bisa mengelola sumber dayanya dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Pertiwi & Marna, 2023). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur penting dalam menilai stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (data diolah).

Berdasarkan Gambar 1.1, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,69%, yang mencerminkan kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah maupun Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 5,31%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5% hingga tahun 2025, yakni masing-masing sebesar 5,05% pada tahun 2023, 5,03% pada tahun 2024, dan kembali sedikit meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia telah berhasil melewati fase pemulihan dan mampu mempertahankan pertumbuhan yang stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi global (Rahayu et al., 2026).

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sektor riil seperti tenaga kerja dan modal, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sektor moneter. Ketiga aspek tersebut yakni sistem pembayaran non tunai, suku bunga acuan, dan jumlah uang beredar merupakan tiga sisi dari satu fenomena yang sama, yaitu transformasi sektor moneter Indonesia pascapandemi COVID-19. Non tunai mencerminkan perubahan cara masyarakat bertransaksi, sedangkan BI Rate dan JUB mencerminkan dua instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan

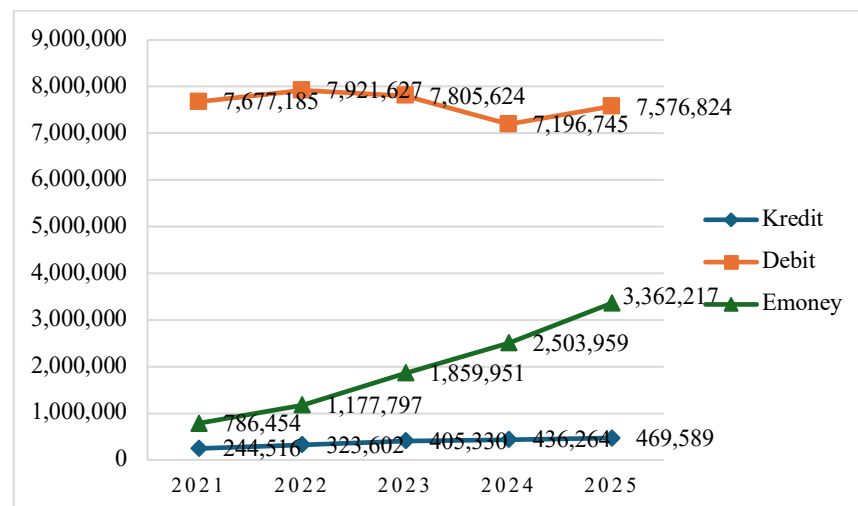
kondisi moneter, masing-masing dari sisi harga uang (suku bunga) dan sisi kuantitas uang (jumlah uang beredar). Ketiganya secara teori sama-sama diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi transaksi dan ketersediaan likuiditas. Namun, sebagaimana akan diuraikan berikut ini, perkembangan ketiganya selama periode 2021–2025 justru menunjukkan pola yang tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas transformasi moneter tersebut terhadap sektor riil.

Di Indonesia, penggunaan pembayaran non tunai seperti APMK dan uang elektronik terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan tersebut semakin terlihat sejak Bank Indonesia menerapkan QRIS pada tahun 2019 yang mendorong penggunaan pembayaran digital di berbagai jenis usaha, termasuk UMKM, pedagang, pasar tradisional, dan sektor transportasi. Perkembangan pembayaran non tunai tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan Bank Indonesia, seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017, serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong penggunaan transaksi non tunai (Hendrawan et al., 2023).

Peningkatan penggunaan pembayaran non tunai dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan mempercepat proses perputaran uang. Biaya transaksi yang lebih rendah juga dapat mendorong

masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Menurut (Lintangsari et al., 2019) peningkatan transaksi non tunai dapat mempercepat perputaran uang yang selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan output dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, perkembangan pembayaran non tunai tidak hanya menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. 2 Nilai Nominal Transaksi Pembayaran Non Tunai di Indonesia 2021-2025 (Rp Milyar)



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Pasca pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, nilai nominal transaksi pembayaran non tunai di Indonesia pada periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup besar meskipun masih mengalami fluktuasi. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Gambar 1.2, pembayaran non tunai dalam penelitian ini terdiri atas beberapa instrumen, yaitu Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan *Electronic Money* (E-Money)

Transaksi melalui Kartu ATM/Debit masih memiliki nilai nominal transaksi yang paling besar dibandingkan instrumen lainnya, yaitu sebesar

Rp7.677.185 Miliar pada tahun 2021 dan sempat naik menjadi Rp7.921.627 Miliar pada tahun 2022. Namun setelah itu nilainya justru menurun dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi Rp7.805.624 Miliar pada 2023 dan Rp7.196.745 Miliar pada 2024, sebelum kembali naik menjadi Rp7.576.824 Miliar pada tahun 2025. Sementara itu, nilai transaksi Kartu Kredit menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp244.516 Miliar pada 2021 menjadi Rp469.589 Miliar pada 2025, meskipun besarnya jauh lebih kecil dibandingkan Kartu ATM/Debit.

Perkembangan yang paling menonjol justru terlihat pada *Electronic Money*, yang naik dari Rp786.454 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.362.217 Miliar pada tahun 2025, atau meningkat lebih dari empat kali lipat dalam lima tahun. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang terus diperluas oleh Bank Indonesia sejak diluncurkan pada 2019, baik dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah merchant yang mengadopsinya (Bank Indonesia, 2023).

Selain transformasi pada sisi sistem pembayaran, sektor moneter Indonesia juga diwarnai oleh dinamika kebijakan suku bunga acuan sebagai instrumen utama Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai salah satu instrumen dalam mengarahkan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas perekonomian. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi keputusan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan konsumsi, investasi, maupun pinjaman. Salah satu contohnya terjadi pada April 2024 ketika Bank

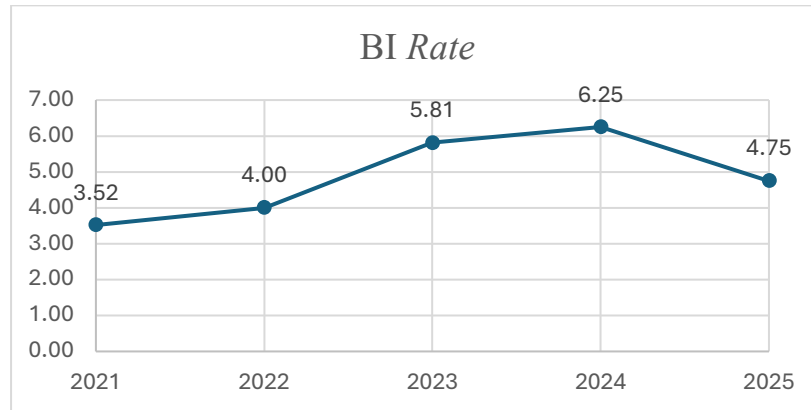
Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global (Bank Indonesia, 2024).

Secara teoritis, kenaikan suku bunga acuan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih menyimpan dana di perbankan dan mengurangi keinginan mengambil kredit. Sebaliknya, penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih rendah sehingga dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan aktivitas tersebut selanjutnya dapat memengaruhi jumlah uang beredar dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan (Sari & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, perubahan suku bunga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa penurunan atau penahanan suku bunga tidak selalu langsung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, Bank Indonesia mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* pada level rendah, yaitu sebesar 3,5%, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi setelah pandemi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut hanya mencapai 3,69%, masih berada di bawah tingkat pertumbuhan sebelum pandemi yang berkisar 5% pada 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung, melainkan dapat dipengaruhi pula oleh kondisi perekonomian dan faktor lain yang terjadi pada periode tersebut.

Perkembangan suku bunga acuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1. 3 BI Rate Tahun 2021-2025



Sumber : Bank Indonesia data diolah

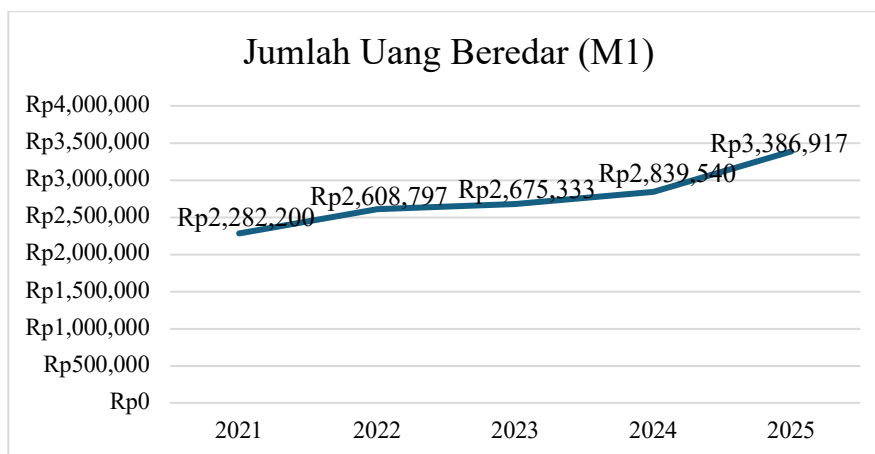
Berdasarkan Gambar 1.3, suku bunga BI terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,52%. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah untuk mendukung proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Suku bunga yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan konsumsi dan investasi sehingga aktivitas ekonomi kembali meningkat. Pada tahun 2024, suku bunga meningkat menjadi 6,10 % yang menunjukkan adanya pengetatan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meskipun suku bunga berada pada tingkat yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tetap berada pada angka 5,03%.

Selain pembayaran non tunai dan suku bunga, jumlah uang beredar juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan jumlah uang beredar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi likuiditas yang tersedia di masyarakat untuk melakukan

berbagai aktivitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah uang beredar di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, kebijakan moneter, serta perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi.

Salah satu komponen jumlah uang beredar yang umum digunakan untuk melihat kondisi likuiditas perekonomian adalah M1, yang mencakup uang kartal yang beredar di tangan masyarakat serta simpanan giro dalam mata uang rupiah (Prihantono & Kholifah, 2023). Peningkatan M1 mencerminkan bertambahnya likuiditas yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi dan investasi, sehingga secara teoritis turut mendorong penguatan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Uang Beredar M1
Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4, jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan mulai terlihat sejak tahun 2021 sebesar Rp2.282.200 Miliar, seiring dengan mulai

pulihnya perekonomian pasca kebijakan stimulus moneter yang diterapkan Bank Indonesia pada masa pandemi COVID-19 (Nurendah, 2024). Selanjutnya, jumlah uang beredar terus meningkat pada periode 2022–2025 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan transaksi dan likuiditas di masyarakat, hingga mencapai Rp3,386,917 Miliar pada akhir tahun 2025 (Amalia Nuralifah et al., 2026).

Secara teoritis, peningkatan penggunaan pembayaran non tunai dan bertambahnya jumlah uang beredar seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi transaksi, serta pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Zai et al., 2025). Selain itu, kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen pengendali moneter juga diduga memiliki peran dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme investasi dan konsumsi (Komalasari et al., 2024). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kenyataannya masih menunjukkan pola yang belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan ketiga indikator moneter tersebut.

Meskipun secara teori ketiga variabel tersebut dianggap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penelitian empiris sebelumnya justru menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten. Christiani (2024) menemukan bahwa transaksi non tunai belum memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada fase awal. Di sisi lain, Jawak & Sipayung (2024) menemukan bahwa jumlah uang beredar dan BI Rate justru berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Latif &

Astuti (2022) serta Asrian & Saharuddin (2024) menyimpulkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ambarawa et al. (2021) menemukan bahwa jumlah uang beredar dan BI Rate berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, fenomena yang telah diuraikan di atas, pertumbuhan transaksi non tunai yang pesat namun tidak selalu diikuti pertumbuhan ekonomi yang sepadan, fluktuasi BI Rate yang tidak selalu berbanding lurus dengan perlambatan atau percepatan ekonomi, peningkatan jumlah uang beredar yang konsisten setiap tahun, serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, sama-sama menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sektor moneter dan capaian pertumbuhan ekonomi riil Indonesia. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa pembayaran non tunai, BI Rate, dan JUB merupakan tiga instrumen yang saling terkait dalam kerangka kebijakan moneter dan modernisasi sistem pembayaran, sehingga penting dikaji pengaruhnya secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini, yaitu untuk menguji secara empiris apakah ketiga instrumen moneter tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode terkini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **"Pengaruh Pembayaran Non-Tunai, BI Rate dan Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pembayaran Non Tunai berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Uang Beredar berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pembayaran Non Tunai terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan analisis pada pengaruh Pembayaran Non Tunai, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian dilaksanakan menggunakan

metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dalam format deret waktu.

Periode pengamatan dalam penelitian ini dari tahun 2016 hingga 2025. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel pertumbuhan ekonomi diwakilkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan, sistem pembayaran non tunai diukur melalui total nilai transaksi sistem pembayaran non tunai, jumlah uang beredar menggunakan indikator M1, sedangkan suku bunga diwakili dengan BI Rate. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis hubungan dan pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan, tanpa memasukkan variabel makroekonomi lainnya.

1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman teoritis penulis tentang pengaruh sistem pembayaran non tunai, jumlah uang beredar (JUB), dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan analisis ilmiah penulis dalam bidang ekonomi makro.
- b. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik sekaligus menjadi bahan pengembangan kajian ekonomi makro, terutama pada isu kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Otoritas Moneter (Bank Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyediakan arahan strategis untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan moneter, khususnya yang berkaitan dengan penetapan suku bunga BI, pengelolaan jumlah uang beredar, dan peningkatan sistem pembayaran non tunai guna memfasilitasi perkembangan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

b. Bagi Lembaga Keuangan dan Industri Sistem Pembayaran

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman mendalam serta wawasan baru terkait peran transaksi non tunai dalam mendukung aktivitas ekonomi, sehingga menjadi landasan strategis untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi sistem pembayaran digital di Indonesia.